PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLONGAN PUTIH PADA KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PALEMBANG 2024

Atharieq Maerka Dwi Putra
NPP. 33.0219
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: mdpatharieq@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si
Email: hapritarigan@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The decline of public political participation in the 2024 Palembang City Regional Election (Pilkada) was indicated by the high number of abstentions (golput), with voter participation reaching only 64.04%, the lowest in South Sumatra Province. This condition raises concerns regarding the effectiveness of political education programs implemented by the Regional National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Palembang City.* ***Purpose:*** *this study aims to analyze the role of Kesbangpol Palembang City in conducting political education to reduce voter abstention in the 2024 Pilkada and to identify the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of political education programs.* ***Method:*** *This research employed a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through semi-structured interviews with 11 informants, observation, and documentation. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, while data validity was ensured through source and technique triangulation.* ***Results:*** *The results indicate that Kesbangpol Palembang City has performed its roles as educator, facilitator, and motivator through political socialization activities, civic forums, and democracy education programs targeting first-time voters. However, these roles have not been fully optimized due to limited human resources, budget constraints, inadequate utilization of digital media, and low public interest in political issues. Regulatory support and collaboration with the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and community organizations serve as key supporting factors, whereas transactional political culture and public apathy remain major obstacles.* ***Conclusion:*** *Kesbangpol Palembang City needs to implement more innovative, collaborative, and sustainable political education strategies by optimizing digital media, expanding program coverage, and strengthening cross-sector partnerships to enhance public political participation and reduce voter abstention in future elections.*

Keywords: *Abstention); Political Participation; Political Education; Role of Kesbangpol; 2024 Local Election.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang Tahun 2024 yang ditandai dengan tingginya angka golongan putih (golput), dimana tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 64,04%, terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kesbangpol Kota Palembang dalam melaksanakan pendidikan politik untuk mengurangi angka golput pada Pilkada Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan politik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur terhadap 11 informan dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol Kota Palembang telah menjalankan perannya sebagai edukator, fasilitator, dan motivator melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik, forum kebangsaan, serta program pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum optimalnya pemanfaatan media digital, dan rendahnya minat masyarakat terhadap isu politik. Faktor pendukung utama berasal dari dukungan regulasi serta kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan organisasi kemasyarakatan, sedangkan budaya politik transaksional dan apatisme masyarakat menjadi faktor penghambat utama. **Kesimpulan:** Kesbangpol Kota Palembang perlu menerapkan strategi pendidikan politik yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi media digital, perluasan jangkauan program, dan penguatan kemitraan lintas sektor guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mengurangi angka golput pada pemilihan umum di masa mendatang.

Kata Kunci: Golput; Partisipasi Politik; Pendidikan Politik; Peran Kesbangpol; Pilkada 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilihan umum (pemilu) menjadi instrumen utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi menentukan pemimpin secara demokratis (Budiardjo, 2010:461). Meskipun pelaksanaan pemilu serentak 2024 secara nasional menunjukkan hasil lebih baik dibanding 2019 dengan partisipasi 81,88%, namun pada level Pilkada kondisinya jauh berbeda. Provinsi Sumatera Selatan mencatat tingkat partisipasi pemilih 85,93% pada Pemilihan Presiden 2024, namun pada Pilkada 2024 angka tersebut turun signifikan menjadi sekitar 72%. Penurunan lebih tajam terjadi di Kota Palembang, dimana tingkat partisipasi Pilkada 2024 hanya mencapai 64,04%, menjadikannya daerah dengan partisipasi terendah di Sumatera Selatan. Kondisi ini sangat kontras dibandingkan Pilkada 2019 yang mencapai 81%. Artinya, sekitar 35,96% atau sepertiga pemilih terdaftar memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang memiliki posisi strategis sebagai lembaga pemerintah daerah yang berfungsi menjaga stabilitas politik dan memperkuat

kehidupan demokrasi. Melalui berbagai program seperti sosialisasi pemilu, pembinaan organisasi masyarakat, forum diskusi kebangsaan, dan kegiatan peningkatan wawasan politik bagi pemuda, Kesbangpol diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam mengurangi angka golput dan membangun kesadaran politik masyarakat (Pemerintah Kota Palembang, 2022).

Faktanya, berbagai program yang telah dilakukan Kesbangpol belum sepenuhnya berhasil menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sinergi antarinstansi, minimnya inovasi metode sosialisasi, serta rendahnya minat politik masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol. Fenomena ini menjadi latar belakang pentingnya penelitian mengenai sejauh mana peran Kesbangpol Kota Palembang dalam pendidikan politik mampu berkontribusi terhadap pengurangan angka golput pada Pilkada 2024.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Kajian mengenai pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Erlina, Kariem, dan Amaliatulwalidain (2024) menyoroti upaya pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada di Kota Palembang. Sementara itu, penelitian Anjani dan Irawaty (2024) mengkaji kolaborasi antara Kesbangpol dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, beberapa penelitian lain umumnya berfokus pada efektivitas program sosialisasi politik, strategi pendidikan politik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada deskripsi program pendidikan politik dan tingkat partisipasi masyarakat, tanpa menganalisis secara mendalam bagaimana peran Kesbangpol dijalankan sebagai institusi yang memiliki mandat formal dalam pendidikan politik. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan evaluatif terhadap program atau partisipasi politik masyarakat, sehingga belum mengkaji peran Kesbangpol melalui perspektif teoretis yang komprehensif. Ketiga, kajian mengenai faktor-faktor struktural dan institusional yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan peran Kesbangpol masih relatif terbatas, terutama pada tingkat pemerintah kota.

Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis peran Kesbangpol dalam pelaksanaan pendidikan politik menggunakan kerangka Teori Peran Biddle yang mencakup dimensi harapan peran (*role expectation*), norma peran (*role norms*), pelaksanaan peran (*role performance*), dan evaluasi peran (*role evaluation*). Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan pelaksanaan peran Kesbangpol dengan fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada melalui analisis faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran tersebut.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menganalisis secara sistematis peran Kesbangpol Kota Palembang dalam melaksanakan pendidikan politik berdasarkan Teori Peran Biddle (2020), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut dalam upaya mengurangi angka golput pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program pendidikan politik, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas peran institusional Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang dalam melaksanakan pendidikan politik sebagai upaya mengurangi angka golput pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2024. Penelitian ini menjadi penting karena tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Palembang hanya mencapai 64,04%, mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan Pilkada 2019 yang mencapai 81%, sekaligus menjadi tingkat partisipasi terendah di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sehingga menjadi tantangan bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena Badan Kesbangpol merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Berbagai program seperti sosialisasi politik, pendidikan politik bagi pemilih pemula, forum diskusi kebangsaan, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan telah dilaksanakan. Namun, tingginya angka golput pada Pilkada 2024 mengindikasikan bahwa pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara optimal. Selain itu, masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya minat politik masyarakat, kurangnya inovasi metode sosialisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam pendidikan politik.

Secara akademis, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan teori peran, pendidikan politik, dan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai bagaimana lembaga pemerintah daerah menjalankan fungsi pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran kelembagaan pemerintah dalam penguatan demokrasi dan pengurangan angka golput.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka Pemerintah Kota Palembang dan Badan Kesbangpol akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai efektivitas program pendidikan politik yang telah dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi masih tingginya angka golput pada Pilkada 2024. Akibatnya, perumusan kebijakan dan strategi peningkatan partisipasi politik berisiko tidak tepat sasaran dan kurang mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatnya sikap apatis terhadap politik, serta menghambat terwujudnya demokrasi lokal yang partisipatif dan berkualitas di Kota Palembang.

1.4. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi. Van Biezen, Mair, dan Poguntke (2012) menegaskan bahwa melemahnya keterhubungan antara partai politik dan masyarakat dapat berdampak pada menurunnya keterlibatan politik warga negara. Penelitian oleh Erlina, Kariem, dan Amaliatulwalidain (2024) menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan Kesbangpol berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sedangkan Alfarisyi, Al Hasani, dan Maulia (2023) menegaskan pentingnya pendidikan demokrasi sebagai sarana pembentukan kesadaran politik warga negara sejak dini. Wangsih et al. (2024) menemukan bahwa efektivitas pendidikan politik dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara dalam menyesuaikan metode sosialisasi dengan karakteristik kelompok sasaran. Selanjutnya, Anjani dan Irawaty (2024) menemukan bahwa keberhasilan program pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh

kolaborasi lintas instansi, sementara Rahman (2017) menyoroti perlunya inovasi metode pendidikan politik agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, penelitian Sitepu et al. (2025) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik dan tingginya angka golput dipengaruhi oleh lemahnya sosialisasi politik serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Arif dan Mulyana (2020) menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada tidak hanya ditentukan oleh faktor administratif penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh tingkat pemahaman politik warga terhadap pentingnya penggunaan hak pilih. Santoso dan Mulyana (2023) menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat dan partisipasi dalam pemilihan umum. Wasistiono dan Rohmadin (2020) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi politik yang kondusif melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan politik masyarakat.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan demokrasi (Erlina et al., 2024; Alfarisyi et al., 2023; Anjani & Irawaty, 2024; Rahman, 2017; Sitepu et al., 2025). Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas program pendidikan politik, partisipasi pemilih pemula, pola kolaborasi antarinstansi, atau faktor penyebab golput. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran Kesbangpol sebagai institusi yang memiliki mandat formal dalam penyelenggaraan pendidikan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Kiess (2022), pendidikan politik berperan penting dalam membangun kapasitas kewargaan (civic capacity) yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik.

Penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan karena belum menggunakan Teori Peran Biddle sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji bagaimana suatu lembaga menjalankan perannya secara sistematis. Kajian terdahulu juga belum menganalisis secara komprehensif dimensi harapan peran (*role expectation*), norma peran (*role norms*), pelaksanaan peran (*role performance*), dan evaluasi peran (*role evaluation*) dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Kesbangpol (Erlina et al., 2024; Anjani & Irawaty, 2024). Di samping itu, penelitian mengenai peran Kesbangpol pada konteks Pilkada Kota Palembang Tahun 2024 masih sangat terbatas, terutama yang mengaitkan pelaksanaan pendidikan politik dengan fenomena menurunnya partisipasi politik masyarakat.

Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menganalisis peran Kesbangpol Kota Palembang dalam melaksanakan pendidikan politik menggunakan Teori Peran Biddle (2020). Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara harapan peran, norma, pelaksanaan, dan evaluasi peran, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran tersebut dalam upaya mengurangi angka golput pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2024.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada aspek teoretis, empiris, dan konseptual. Pertama, secara teoretis, penelitian ini merupakan salah satu kajian yang mengoperasionalkan Teori Peran Biddle (2020) melalui empat dimensi utama, yaitu harapan peran (role expectation), norma peran (*role norms*), pelaksanaan peran (*role performance*), dan evaluasi peran (*role evaluation*) untuk menganalisis peran Kesbangpol dalam pendidikan politik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mendeskripsikan program pendidikan politik atau tingkat partisipasi masyarakat (Erlina et al., 2024;

Anjani & Irawaty, 2024), penelitian ini menempatkan Kesbangpol sebagai aktor institusional yang dianalisis secara menyeluruh berdasarkan dimensi-dimensi peran yang saling berkaitan.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa efektivitas pendidikan politik tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kesesuaian antara harapan peran yang dibebankan kepada lembaga, norma yang mengatur pelaksanaannya, kapasitas pelaksana, serta mekanisme evaluasi yang diterapkan. Temuan ini memperluas kajian pendidikan politik yang selama ini lebih berfokus pada output kegiatan dan tingkat partisipasi pemilih, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan politik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang melekat pada organisasi penyelenggaranya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan politik dan partisipasi politik melalui pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) yang masih relatif terbatas dalam penelitian sejenis.

Penelitian ini menghasilkan temuan baru mengenai hubungan antara pelaksanaan peran Kesbangpol dan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan program pendidikan politik belum secara otomatis mampu meningkatkan partisipasi politik apabila masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, rendahnya pemanfaatan media digital, budaya politik transaksional, serta rendahnya minat masyarakat terhadap isu politik. Temuan ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendidikan politik dalam menekan angka golput, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu (Rahman, 2017; Sitepu et al., 2025).

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan akademik terhadap pengembangan kajian peran Kesbangpol dengan menghasilkan model analisis yang menghubungkan dimensi peran lembaga, pelaksanaan pendidikan politik, dan partisipasi politik masyarakat dalam satu kerangka yang terpadu. Model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik tidak hanya memerlukan intensitas pendidikan politik, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi strategi pendidikan politik berbasis media digital. Pontes, Henn, dan Griffiths (2019) menjelaskan bahwa generasi muda cenderung memperoleh informasi sosial dan politik melalui media digital yang bersifat interaktif, sehingga pendekatan komunikasi politik konvensional menjadi semakin kurang efektif apabila tidak disesuaikan dengan karakteristik pengguna media digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai peran Kesbangpol, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan strategi pendidikan politik yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan peran Badan Kesbangpol Kota Palembang dalam melaksanakan pendidikan politik guna mengurangi angka golput pada Pilkada 2024; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Palembang dalam upaya mengurangi angka golput.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam proses, makna, serta dinamika pelaksanaan pendidikan politik Kesbangpol Kota Palembang yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau analisis statistik (Creswell, 2018:4-5). Data dikumpulkan melalui: (1) wawancara semi-terstruktur kepada 11 informan; (2) dan dokumentasi berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip internal Kesbangpol, serta data partisipasi politik yang relevan.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci (*key informant*) berjumlah 1 orang, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang. Kepala Badan dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan tertinggi dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pengelolaan program pendidikan politik, serta penguasaan informasi yang paling komprehensif terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol dalam pendidikan politik. Selain itu, posisi Kepala Badan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian yang mengkaji peran Kesbangpol dalam mengurangi angka golput pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2024.

Kategori informan utama berjumlah 4 orang, terdiri atas Sekretaris Kesbangpol Kota Palembang, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, dan 2 orang staf atau pejabat fungsional yang terlibat secara langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pendidikan politik. Informan utama dipilih karena memiliki pengalaman operasional dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus penelitian.

Kategori informan pendukung berjumlah 6 orang, yang terdiri atas 1 Komisioner KPU Kota Palembang, 1 Anggota Bawaslu Kota Palembang, 1 perwakilan partai politik, 1 akademisi atau ahli politik dari Universitas Sriwijaya, serta 2 anggota masyarakat dari wilayah yang berbeda di Kota Palembang. Informan pendukung dipilih untuk memperoleh perspektif eksternal mengenai efektivitas pendidikan politik yang dilaksanakan Kesbangpol dan dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat.

Mekanisme *snowball sampling* dilakukan setelah wawancara dengan informan yang telah ditentukan melalui *purposive sampling*. Setiap informan diminta memberikan rekomendasi mengenai individu lain yang dianggap memiliki informasi relevan, memahami pelaksanaan pendidikan politik, atau terlibat dalam proses yang berkaitan dengan fokus penelitian. Rekomendasi tersebut kemudian diverifikasi berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan data penelitian sebelum ditetapkan sebagai informan tambahan. Melalui mekanisme ini, peneliti memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam dari berbagai perspektif yang saling melengkapi.

Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan penelitian berlangsung selama tiga bulan, yaitu Februari sampai April 2025. Tahap persiapan dan penyusunan instrumen penelitian dilakukan pada Februari 2025, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dilaksanakan pada Maret 2025 hingga pertengahan April 2025, sedangkan tahap verifikasi data, analisis, dan penyusunan hasil penelitian dilakukan pada akhir April 2025.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014:31-33) yang meliputi tiga tahapan, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan serta verifikasi kesimpulan). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks, dan kategorisasi temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan memperhatikan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Badan Kesbangpol Kota Palembang menggunakan Teori Peran Biddle (2020) yang dioperasionalkan dalam empat dimensi: harapan peran, norma peran, pelaksanaan peran, dan evaluasi/sanksi peran. Berikut pembahasan masing-masing dimensi.

3.1. Harapan Peran (Role Expectation)

Harapan terhadap peran Kesbangpol sangat tinggi dari berbagai pihak. Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan harapan agar institusinya menjadi "ujung tombak dalam membangun kesadaran politik masyarakat" bukan sekadar menjalankan program secara formalitas. Komisioner KPU Kota Palembang menilai Kesbangpol memiliki keunggulan strategis karena dapat melakukan pendidikan politik sepanjang waktu, berbeda dengan KPU yang hanya bekerja intens pada tahapan pemilu.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menekankan pentingnya Kesbangpol meningkatkan pemberian pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya di Kota Palembang. Sementara dari sisi masyarakat, harapan lebih konkret agar Kesbangpol "lebih sering turun langsung ke masyarakat" dan tidak hanya hadir dalam acara resmi. Empat harapan utama yang muncul adalah: meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memberikan pemahaman rasional dalam memilih, hadir langsung di tengah masyarakat, dan melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan. Namun berdasarkan kondisi lapangan, harapan ini belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari masih rendahnya partisipasi Pilkada 2024.

3.2. Norma Peran

Secara normatif, pelaksanaan pendidikan politik Kesbangpol telah mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 36 Tahun 2010, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 89 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan kegiatannya, telah diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), pembentukan panitia, dan penjadwalan kegiatan.

Tabel 1.
Regulasi Dasar Pelaksanaan Pendidikan Politik Kesbangpol

No	Dasar Regulasi	Substansi
1	Permendagri No. 36 Tahun 2010	Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik
2	Permendagri No. 11 Tahun 2019	Perubahan Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik
3	Perwal Palembang No. 89 Tahun 2022	Tupoksi Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol
4	UU No. 7 Tahun 2017	Tentang Pemilihan Umum
5	UU No. 10 Tahun 2016	Tentang Pilkada

Sumber: Hasil diolah peneliti (2026)

Meskipun secara formal norma peran telah dijalankan dengan baik, namun hasilnya belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan prosedural dengan dampak substantif dari program yang dijalankan.

3.3. Pelaksanaan Peran

Kesbangpol Kota Palembang telah melaksanakan berbagai program pendidikan politik, antara lain: sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat umum, pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui program Demokrasi Menuju Sekolah dan Demokrasi Menuju Kampus, forum diskusi kebangsaan, pelatihan kader demokrasi, rapat koordinasi kepemiluan, simulasi pencoblosan, penyuluhan pentingnya hak pilih, serta kampanye digital anti golput.

Tabel 2.
Program Pendidikan Politik Kesbangpol Kota Palembang

No	Program/Kegiatan	Sasaran
1	Sosialisasi Pendidikan Politik	Masyarakat Umum
2	Demokrasi Menuju Sekolah	Pelajar/Pemilih Pemula
3	Demokrasi Menuju Kampus	Mahasiswa
4	Forum Diskusi Kebangsaan	Tokoh Masyarakat & Ormas
5	Pelatihan Kader Demokrasi	Kader Partai & Pemuda
6	Simulasi Pencoblosan	Pemilih Pemula
7	Kampanye Digital Anti Golput	Generasi Muda

Sumber: Hasil wawancara peneliti (2026)

Namun efektivitas pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian menyatakan "Jumlah personel kami sangat terbatas, hanya sekitar 8 orang." Jangkauan kegiatan juga belum merata sebagaimana diakui sendiri oleh Kepala Badan: "Jangkauan kegiatan ini masih terbatas, baik dari segi wilayah maupun jumlah peserta." Dari sisi masyarakat, warga Kecamatan Sukarami menyatakan bahwa kegiatan pendidikan politik "tidak terlalu terasa di lingkungan saya."

3.4. Evaluasi/Sanksi Peran

Evaluasi peran dilakukan dengan melihat capaian program secara administratif serta tingkat partisipasi masyarakat. Kepala Badan Kesbangpol sendiri mengakui: "Memang kegiatan sudah dilaksanakan... tapi kalau kita lihat dampaknya terhadap partisipasi masyarakat, masih belum signifikan." KPU juga menegaskan: "Kalau kita lihat dari data partisipasi, memang masih ada penurunan di beberapa wilayah."

Evaluasi yang dilakukan masih bersifat kuantitatif dan belum menggambarkan kualitas pendidikan politik secara mendalam. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan sanksi khusus terhadap Kesbangpol apabila terjadi penurunan partisipasi, sehingga penurunan angka lebih dipandang sebagai bahan evaluasi perbaikan program ke depan daripada kegagalan yang berakibat sanksi administratif.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap pengembangan Teori Peran Biddle (2020), khususnya dalam memahami hubungan antara harapan peran (*role expectation*), norma peran (*role norms*), pelaksanaan peran (*role performance*), dan evaluasi peran (*role evaluation*) dalam

konteks organisasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian antara norma peran dan pelaksanaan peran tidak selalu berbanding lurus dengan tercapainya harapan peran. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas suatu peran tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam menerjemahkan mandat kelembagaan menjadi hasil yang berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman Teori Peran Biddle ke dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah dengan menekankan pentingnya faktor-faktor struktural dalam menjembatani hubungan antara pelaksanaan peran dan pencapaian tujuan organisasi.

Interpretasi tersebut sejalan dengan temuan Erlina, Kariem, dan Amaliatulwalidain (2024) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik pemilih pemula. Kesamaan temuan ini menguatkan argumentasi bahwa keberhasilan pendidikan politik tidak dapat diukur hanya dari terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan perilaku politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan politik dengan menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan politik perlu dipahami melalui perspektif kelembagaan, bukan semata-mata melalui pendekatan programatik.

Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor kelembagaan dan faktor sosial-politik. Dalam konteks tersebut, hasil penelitian mendukung temuan Faizal dan Toana (2025) yang menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan politik dan praktik politik transaksional dapat menghambat berkembangnya partisipasi politik yang berbasis kesadaran politik. Pada saat yang sama, penelitian ini juga memperkuat argumentasi Anjani dan Irawaty (2024) mengenai pentingnya kolaborasi multi-*stakeholder* dalam meningkatkan efektivitas pendidikan politik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan politik tidak hanya bergantung pada kapasitas satu institusi, tetapi juga pada kemampuan membangun sinergi antaraktor dalam sistem politik lokal.

Dari perspektif yang lebih luas, temuan penelitian ini relevan dengan argumentasi Norris (2019) yang menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus bersifat berkelanjutan, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang menunjukkan pentingnya transformasi pendekatan pendidikan politik dari model yang bersifat administratif menuju model yang lebih partisipatif dan berbasis keterlibatan masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan Loader et al. (2014) yang menyoroti pentingnya pemanfaatan ruang digital dalam membangun keterlibatan politik generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian pendidikan politik dengan menegaskan bahwa adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi merupakan prasyarat penting bagi peningkatan efektivitas pendidikan politik di era digital.

Secara keseluruhan, kontribusi ilmiah utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif kelembagaan dalam kajian pendidikan politik dan partisipasi politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara tujuan pendidikan politik dan hasil yang dicapai tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku individu masyarakat, tetapi perlu dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antara struktur kelembagaan, kapasitas organisasi, dan lingkungan sosial-politik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan Teori Peran Biddle dalam studi pemerintahan dan memberikan landasan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara peran organisasi publik, pendidikan politik, dan partisipasi politik masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian, temuan menariknya ada pada faktor pendukung pelaksanaan pendidikan politik meliputi: (1) adanya regulasi yang jelas sebagai dasar pelaksanaan; (2) kerja sama

lintas instansi dengan KPU, Bawaslu, partai politik, dan organisasi masyarakat; dan (3) koordinasi yang baik antar *stakeholder*. Ketiga faktor ini saling memperkuat: regulasi memberikan legitimasi bagi Kesbangpol untuk berkolaborasi, sementara koordinasi lintas instansi memperluas jangkauan program ke segmen masyarakat yang tidak dapat dijangkau Kesbangpol secara mandiri. Dalam perspektif Teori Peran Biddle (2020), faktor-faktor pendukung ini merepresentasikan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya norma peran sesuai harapan stakeholder. Sementara itu, faktor penghambat yang dominan antara lain: (1) keterbatasan sumber daya manusia; (2) keterbatasan jangkauan kegiatan; (3) keterbatasan waktu dan anggaran; (4) rendahnya minat dan kesadaran masyarakat; (5) rendahnya kepercayaan terhadap proses politik; dan (6) budaya politik transaksional. Faktor-faktor penghambat ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan secara sistemik. Keterbatasan SDM dan anggaran menyebabkan jangkauan program terbatas, yang pada gilirannya membuat program tidak mampu menjawab hambatan struktural seperti budaya politik transaksional dan apatisme masyarakat. Dalam kerangka Teori Peran, hambatan-hambatan ini menjadi penyebab utama kesenjangan antara *expected role* dan *actual role* Kesbangpol

Salah satu temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah munculnya paradoks antara intensitas pendidikan politik yang telah dilakukan dengan tingkat partisipasi politik pemilih pemula yang masih relatif rendah. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih pemula sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuan politik, rendahnya kesadaran politik, atau kurangnya sosialisasi mengenai pemilu. Namun, penelitian ini menemukan fenomena yang berbeda. Temuan ini juga sejalan dengan Yamamoto dan Nah (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan politik generasi muda cenderung meningkat ketika komunikasi politik dilakukan melalui media yang memungkinkan interaksi, partisipasi, dan produksi konten oleh pengguna. Apatisme pemilih pemula di Kota Palembang tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi politik, melainkan oleh ketidaksesuaian antara metode pendidikan politik yang digunakan dengan karakteristik generasi muda sebagai sasaran program.

Kontribusi empiris baru dari penelitian ini terletak pada identifikasi fenomena *pedagogical mismatch*, yaitu ketidaksesuaian antara pendekatan pendidikan politik yang diterapkan oleh penyelenggara dengan preferensi belajar dan pola konsumsi informasi generasi muda. Program seperti Demokrasi Menuju Sekolah dan Demokrasi Menuju Kampus pada dasarnya telah menyediakan akses informasi politik bagi pemilih pemula. Akan tetapi, pendekatan yang masih didominasi oleh ceramah, sosialisasi formal, dan komunikasi satu arah cenderung kurang mampu membangun keterlibatan aktif peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketersediaan informasi politik, melainkan pada rendahnya kemampuan metode pendidikan politik dalam menciptakan pengalaman belajar yang relevan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Temuan tersebut membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya memandang hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi politik secara linier, yakni semakin banyak pendidikan politik diberikan maka semakin tinggi partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian metode penyampaian dengan karakteristik kelompok sasaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru berupa penjelasan bahwa rendahnya partisipasi pemilih pemula dapat terjadi meskipun program pendidikan politik telah dilaksanakan secara rutin apabila metode yang digunakan belum mampu menjawab perubahan pola komunikasi dan perilaku generasi muda.

Dari perspektif yang lebih luas, temuan ini memperkaya kajian pendidikan politik dengan memperkenalkan dimensi kualitas interaksi dalam proses pendidikan politik. Pendidikan politik tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai proses transfer informasi politik, tetapi juga sebagai proses membangun keterlibatan (*engagement*) dan pengalaman belajar politik yang bermakna. Dalam konteks tersebut, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Loader et al. (2014) yang menekankan

pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan penguatan literasi digital dalam meningkatkan keterlibatan politik generasi muda. Namun demikian, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya keterbatasan akses digital, melainkan adanya kesenjangan antara desain program pendidikan politik dan pola konsumsi informasi generasi muda.

Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian pendidikan politik dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan politik bagi pemilih pemula tidak hanya ditentukan oleh intensitas sosialisasi atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kemampuan institusi penyelenggara dalam menyesuaikan metode, media, dan strategi komunikasi dengan karakteristik generasi yang menjadi sasaran program. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengusulkan bahwa kesenjangan metode pendidikan politik (*pedagogical mismatch*) merupakan salah satu determinan baru yang perlu dipertimbangkan dalam kajian partisipasi politik pemilih pemula, selain faktor pengetahuan politik, kesadaran politik, dan intensitas sosialisasi yang selama ini lebih dominan dibahas dalam literatur. Temuan ini sekaligus membuka ruang bagi pengembangan model pendidikan politik yang lebih adaptif, interaktif, dan berbasis teknologi digital dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kesbangpol Kota Palembang telah menjalankan perannya dalam pendidikan politik melalui fungsi edukator, fasilitator, dan motivator sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, peran tersebut belum optimal dalam mengurangi angka golput pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2024 karena masih terdapat kesenjangan antara harapan peran (*expected role*) dan pelaksanaan peran aktual (*actual role*). Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan pendidikan politik dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berinteraksi. Faktor pendukung utama meliputi dukungan regulasi yang jelas dan kerja sama lintas instansi, sedangkan faktor penghambat terdiri atas keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan jangkauan program, rendahnya minat serta kepercayaan politik masyarakat, dan masih kuatnya budaya politik transaksional yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Kesbangpol Kota Palembang disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana pendidikan politik yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Selain itu, diperlukan perluasan jangkauan program pendidikan politik kepada berbagai kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program, serta penguatan kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada konteks Kota Palembang dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus pada peran Kesbangpol dalam pendidikan politik sehingga belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor lain di luar kewenangan Kesbangpol yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas berbagai model pendidikan politik berbasis digital, khususnya bagi pemilih muda, serta

melakukan studi komparatif antar daerah guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh Kesbangpol.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan. Terima kasih pula kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan data penelitian, serta KPU Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang, dan seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alfarisyi, M. R., Al Hasani, A., & Maulia, S. (2023). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu melalui pendidikan demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *8*(1), 60–68. https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766

Anjani, L. M. I. D., Irawaty, T., & Wulandari, W. (2024). Peran kesatuan bangsa dan politik dalam pendidikan politik di kabupaten bandung Barat pada pemilu dan pemilihan serentak. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 1-15. https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2550

Arif, M., & Mulyana. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak di kota ternate provinsi maluku utara tahun 2018 (studi kasus di kecamatan ternate selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46*(2), 381-395. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang. (2024). *Laporan evaluasi partisipasi pemilih Pilkada Kota Palembang 2024*. Bawaslu Kota Palembang.

Biddle, B. J. (2020). *Role theory: expectations, identities, and behaviors* (reprint ed.). Academic Press.

Citrayanti, S. A., & Yuhertiana, I. (2021). Faktor yang mempengaruhi keputusan memilih pada pemilih muda dalam pilkada tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47*(2), 143-158 https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1840

Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar ilmu politik* (edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Erlina, E., Kariem, M. Q., & Amaliatulwalidain. (2024). Partisipasi pemilih pemula dalam pendidikan politik pada Pemilu 2024 di Kota Palembang (Studi kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *7*(2), 105-118. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v7i2.10470

Kiess, J. (2022). Learning by doing: the impact of experiencing democracy in education on political trust and participation. *Journal of European Social Policy*, *42*(1), 3–18. https://doi.org/10.1177/0263395721990287

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, *17*(2), 143–150. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Norris, P. (2019). *Why american elections are flawed (and how to fix them)*. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501736322

Pemerintah Kota Palembang. (2022). *Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 89 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang*. Pemerintah Kota Palembang.

Pontes, A. I., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2019). Youth political (dis)engagement and the need for citizenship education: encouraging young people's civic and political participation through the curriculum. *Education, Citizenship and Social Justice*, *14*(1), 3–21. https://doi.org/10.1177/1746197917734542

Rahman, A. (2017). Konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui pendidikan kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 44-54. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385

Santoso, A. H., & Mulyana, M. (2023). Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Tahun 2020 di kota balikpapan provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 49*(1), 89–101. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3356

Sitepu, E. M. R., Aridho, A., Hutapea, N. M., & Halking. (2025). Strategi kpu dalam mengatasi tindakan golput pada perilaku pemilih pemula dalam pilkada di desa sei mencirim kecamatan sunggal kabupaten deli serdang 2024. *Civics Education and Social Science Journal*, *7*(1), 1-13. https://doi.org/10.32585/cessj.v7i1.5963

Van Biezen, I., Mair, P., & Poguntke, T. (2012). Going, going, ... gone? the decline of party membership in contemporary europe. *European Journal of Political Research, 51*(1), 24–56. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.01995.x

Wangsih, W., Karina, R. N., & Rahmadanita, A. (2024). Pendidikan politik oleh partai politik dalam meningkatkan kualitas masyarakat pada pemilu yang cerdas, objektif, dan bermoral di kabupaten sumedang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *50*(2), 219–236. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i2.4845

Yamamoto, M., & Nah, S. (2018). Mobile information seeking and political participation: A differential gains approach with offline and online discussion attributes. *New Media & Society*, *20*(5), 1600–1618. https://doi.org/10.1177/1461444817712722